

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIBOGO KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

WAHYU SEPTIANA¹, NETI SUNARTI²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya swadaya masyarakat dan kurangnya anggaran untuk pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri 3 orang perangkat desa, 1 orang perwakilan BPD dan 2 orang tokoh masyarakat. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33.33% menyatakan baik dan sebanyak 66.67% menyatakan kurang baik. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan swadaya dari masyarakat dan masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti : berusaha untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan dan berusaha membantu ketersediaan anggaran yang memadai bagi panitia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Kata kunci : Pembangunan, Infrastruktur, Pedesaan

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan

pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing. Pada intinya, pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa dengan cara

MODERAT

Modern dan Demokratis

memanfaatkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa juga dimaknai sebagai upaya membangun kehidupan masyarakat di pedesaan secara wajar dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh program-program pembangunan makro.

Sejalan dengan pembangunan desa tersebut, kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat mendukung karena dengan kebijakan ini penyerahan kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah telah diatur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk daerah pedesaan.

Dalam upaya menjalankan amanat undang-undang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang tepat agar pembangunan berjalan secara merata, khususnya di daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah perkotaan.

Pembangunan pedesaan merupakan prioritas yang perlu diutamakan oleh pemerintah daerah, karena di wilayah ini ada berbagai kondisi ketertinggalan dan keterbelakangan, baik dilihat dari aspek geografis, topografis, demografis maupun sarana dan prasarana. Adisasmita (2006: 21) menyatakan bahwa :

Di daerah pedesaan juga ada kelemahan akses atas modal dan informasi pasar, rendahnya kemampuan SDM, belum proaktifnya partisipasi masyarakat, lemahnya kemampuan kelembagaan pedesaan, dan masih banyaknya kelemahan operasional dan fungsional lainnya

Pembangunan infrastruktur (fisik) adalah pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik yang terwujud dalam bentuk pembangunan gedung-gedung, pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan saluran irigasi air dan pembangunan prasarana lainnya yang nampak atau yang dapat dilihat langsung oleh panca indera kita. Sedangkan pembangunan mental spiritual atau pembangunan non fisik adalah pembangunan yang menyangkut pemenuhan

kebutuhan rohaniah yang terbentuk dalam wujud relatif abstrak, seperti rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab rasa keadilan dan lain-lain yang tidak nampak atau yang tidak dapat dilihat panca indera kita.

Fenomena ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan sering luput dari pantauan pemerintah daerah, sementara akses informasi masyarakat mengenai program-program pembangunan juga masih terbatas, terutama di daerah desa-desa terpencil. Program penyuluhan pembangunan yang dijalankan pemerintah kadang-kadang kurang efektif menjangkau keseluruhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan menyalurkan aspirasi. Ketimpangan informasi dan komunikasi diantara pemerintah daerah dengan masyarakat ini menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Akibatnya tidak sedikit program-program pembangunan mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan oleh karena adanya ketimpangan komunikasi dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang belum optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Pemerintah desa belum memperhatikan aspek keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Contohnya : hasil pembangunan saluran irigasi yang telah dilaksanakan tidak disertai perawatan sehingga cepat rusak sehingga kurang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 2) Dalam penentuan proyek pembangunan infrastruktur sering terjadi ketidaktepatan pemilihan skala prioritas. Contohnya : dalam perencanaan ditetapkan pembangunan saluran irigasi, karena saluran irigasi dibutuhkan masyarakat untuk mengairi sawah yang sering kekeringan namun dalam realisasinya yang dibangun kirmir jalan. 3) Kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Contohnya : Pemerintah Desa kurang terbuka dalam mengajak semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan

gorong-gorong maupun jembatan sehingga menyebabkan hanya sedikit masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini :
1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?
2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?
3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ?

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang perwakilan BPD 2 orang perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

LANDASAN TEORI

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan penerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Pembangunan menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:4) adalah :

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah dikenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam

sitasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa sesuai kewenangannya menurut Soemantri (2011:73), perlu memperhatikan aspek-aspek dalam melaksanakan pembangunan, yang antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memerankan fungsi dan tujuannya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.

Menurut Nasution (2007:56) tujuan Pembangunan terbagi atas 2 bagian, yaitu :

1. Tujuan Umum Pembangunan adalah :“Suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan”.
2. Tujuan Khusus Pembangunan adalah :“Tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu”.

Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan publik

yang disusun harus mencakup kepentingan dari seluruh masyarakat. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional.

Infrastruktur merupakan alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat desa. Infrastruktur pedesaan merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi primer untuk memberikan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan masyarakat.

Menurut Suryadi (2005:61) Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan :

Untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Disisilain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang dimiliki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Pembangunan Infrastrukturs pedesaan mempunyai peranan penting dalam kontek pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78, bahwa :

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Meskipun sasaran pembangunan pedesaan tersebut merupakan kegiatan yang multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur pedesaan dituntut untuk dapat memperhatikan aspek-aspek penting pembangunan pedesaan. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan pedesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan.

Oleh karena itu pembangunan wilayah pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran maka analisis hasil wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mendukung kordinasi antar pelaku pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam membentuk panitia pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur selalu melakukan kordinasi secara lebih mendalam dengan LPM dan BPD untuk merencanakan anggaran serta teknis pelaksanaan sehingga apa yang akan dilaksanakna oleh panitia sesuai dengan

perencanaan awal yang tercantum dalam RKPdes, hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa dalam membentuk panitia pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur selalu melakukan koordinasi secara lebih mendalam dengan LPM dan BPD untuk merencanakan anggaran serta teknis pelaksanaan sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan perencanaan awal yang tercantum dalam RKPdes, hal ini diketahui dari banyaknya masyarakat dalam menghadiri dan mengikuti rapat pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat dapat ikut memberikan ide dan saran tentang pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui dan ikut mengawasi dari mulai tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Effendi (2001:116) tentang koordinasi adalah :

Interaksi yang harmonis diantara para pegawai suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal diantara para pegawai secara timbal balik pula. demikian pula interaksi antara pimpinan organisasi, apakah ia manajer tingkat tinggi (*top manager*) atau manajer tingkat menengah (*middle manager*) dengan masyarakat luar organisasi.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan dari hasil musrenbangdes yang selanjutnya tertuang dalam RKPDes dan menjamin bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan yang merupakan lanjutan dari program pembangunan sebelumnya . mengingat pelaksanaan

pembangunan tidak dapat diselesaikan secara langsung namun memerlukan proses yang berpedoman berdasarkan pada hasil musrenbangdes. Hal ini diketahui dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang belum tersusun secara matang dan belum sesuai dengan aturan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa selalu menjamin terciptanya pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan pembangunan dari hasil musrenbangdes yang selanjutnya tertuang dalam RKPDes untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu antar fungsi pemerintah maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas, hal ini bisa dilihat dari proses perencanaan pembangunan belum tersusun dengan rapih.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Solekhan (2014:60) Rencana pembangunan desa adalah : "Merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota".

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa menjamin bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dan sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari masyarakat berupa swadaya yang besarnya telah ditentukan bersama, hal ini diketahui bahwa setiap proses pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan pada hasil musrenbangdes

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa menjamin bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dan sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan serta di awasi bersama-sama agar hasil dari pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan anggaran dan ditambah dari hasil swadaya masyarakat

sehingga masyarakat bisa mengawasi dari mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Tjokroamidojo (2003:36) yang selengkapnya sebagai berikut:

Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Pemerintahan Desa telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi dalam pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari setiap proses perencanaan selalu mengundang masyarakat untuk hadir dan terlibat menjadi panitia pelaksanaan dan berperan serta memberikan berbagai masukan dalam pembangunan walaupun pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya bisa terlibat secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi dalam pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, hal ini bisa diketahui dari kurangnya masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Adisasmita (2006:37) yaitu :

Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan pedesaan diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dan terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan, dan ketersediaan berkorban untuk keberhasilan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa telah

memberikan jaminan bahwa penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, hal ini diketahui bahwa Pemerintahan Desa belum sepenuhnya melakukan perencanaan bersama-sama dengan panitia pelaksana serta belum menunjuk pelaksana pembangunan sehingga belum memiliki penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum semua sumber daya yang ada di desa diberdayakan secara efektif dan efisien sehingga proses pelaksanaan pembangunan belum merata dan berlanjut sampai dengan yang diharapkan.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Solch (2014:45) pembangunan adalah : "Usaha terencana untuk mengarahkan rakyat di negara yang bersangkutan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat di negara yang bersangkutan".

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah, hal ini sesuai dengan pendapat

Solckhan (2014:70) mengatakan bahwa : "Pembangunan kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antara Desa dalam satu Kabupaten /Kota", yang meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pembangunan Insprastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya :

1. Belum optimalnya dukungan dari semua pihak dalam pembentukan panitia pelaksana dan sulitnya dilakukan koordinasi karena adanya kepentingan individual dalam panitia pelaksana serta terbatasnya anggaran sehingga dari persepsi kurang mendapatkan dukungan dari pemerintahan desa.
2. Adanya keinginan masyarakat yang cenderung memaksakan kehendak dalam pelaksanaan pembangunan dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga target pembangunan tidak tercapai sesuai dengan perencanaan.
3. Kurangnya peran serta semua pihak dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seperti kurangnya masukan atau ide dari masyarakat, kurangnya pengawasan dan kurangnya swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
4. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi hasil pembangunan sehingga hasil pembangunan tidak sesuai target yang diharapkan.
5. Adanya fihak-fihak yang memanfaatkan situasi sehingga penggunaan sumber daya kurang efisien dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu terlaksananya pembangunan secara efektif sehingga masih adanya masyarakat yang kurang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa yang menyebabkan hasil

pembangunan kurang memenuhi aspek keadilan.

Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapai dalam Pembangunan Insprastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dilakukan berbagai upaya dalam pembangunan Insprastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Dengan berusaha merangkul semua lapisan masyarakat untuk menghadiri rapat pembentukan panitia dan perencanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta melakukan kordinasi secara mendalam dengan berbagai tokoh masyarakat, BPD, tokoh pemuda, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sehingga tujuan pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
2. Pemerintahan Desa berusaha untuk selalu memusyawarahkan semua keinginan mayarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat merasa dihargai oleh pemerintah desa dan memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan bersama.
3. Merangkul semua lapisan masyarakat yang ada si Desa untuk ikut bersama-sama memberikan masukan/ide dan mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan berbagai masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang.
4. Mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarkat agar dapat ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mcrasa dihargai oleh pemerintah desa dan memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan bersama.
5. Mendorong Pemerintah Desa dan Panitia perencanaan pembangunan insfrastruktur untuk mempergunakan semua sumber daya yang tersedia di lingkungan Desa secara

efektif dan efisien sehingga pembangunan dapat, dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya dalam Pembangunan Insprastuktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran seperti secara rutin melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan berbagai masalah yang terjadi sehingga dapat mengetahui prioritas pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat selain itu secara terbuka memberitahukan kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan meminta masyarakat terlibat dalam berbagai pertemuan untuk merencanakan pelaksanaan pembangunan serta mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembangunan Insprastuktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Insprastuktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33.33% menyatakan baik dan sebanyak 66.67% menyatakan kurang baik. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pembangunan Insprastuktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum optimal mengingat hasil pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPD) sehingga dalam pelaksanaannya pemerintahan desa kurang memperhatikan aspek-aspek dalam melaksanakan pembangunan.
2. Pembangunan Insprastuktur Pedesaan Oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan

baik karena adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta keterbatasan anggaran sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pembangunan Insprastuktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum optimal mengingat adanya rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan kurangnya swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan baik materil maupun tenaga yang bersifat gotong royong sehingga menyebabkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Dilakukan berbagai upaya dalam pembangunan Insprastuktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat merasa dihargai oleh pemerintah desa dan memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan bersama. Selain itu pemerintahan desa mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan berbagai masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya dalam Pembangunan Insprastuktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran seperti secara rutin melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan berbagai masalah yang terjadi sehingga dapat mengetahui prioritas pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat selain itu secara terbuka memberitahukan kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan meminta masyarakat terlibat dalam

berbagai pertemuan untuk merencanakan pelaksanaan pembangunan serta mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa sebaiknya lebih terbuka kepada masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur mengingat masyarakat pada saat sekarang semakin peka sehingga apabila terdapat ketidakjelasan dalam suatu pelaksanaan pembangunan apalagi menyangkut uang maka akan menjadi masalah besar.
2. Sebaiknya pemerintah desa dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur lebih dekat dengan masyarakat dalam arti melibatkan masyarakat dalam berbagai proses atau tahapan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
3. Sebaiknya pemerintahan desa dapat mengupayakan berbagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti menyediakan anggaran yang lebih memadai dan secara transparan mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat dan akan menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2013 : *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Nasution, 2007. *Perbandingan Profitabilitas Industri Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Menggunakan Metode Struktur Kinerja dan Perilaku*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Volume VII. Januari 2007
- Suryadi, 2005. *Peran aparaturnya Pemerintah Dalam Era Pembangunan*. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.

